

Efektifitas Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang

Effectiveness of Community Empowerment Program in Infrastructure Development in Kotasan Village, Galang District, Deli Serdang Regency

Wahyu Andika¹⁾, Syahfruddin Ritonga²⁾* & Novita Wulandari¹⁾

1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area, Indonesia

2) Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: 2024-09-26; Direview: 2025-07-19; Disetujui: 2025-07-20;

*Corresponding Email: svafruddin@staff.uma.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Kotasan, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, serta mengidentifikasi tantangan dan dampak sosial yang ditimbulkan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi proses pelaksanaan program melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembangunan infrastruktur dinilai efektif berdasarkan tiga indikator utama: pencapaian tujuan, integrasi sosial, dan kemampuan adaptasi terhadap kondisi lokal. Program berhasil dilaksanakan tepat waktu dan tepat sasaran, dengan partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan. Tantangan yang dihadapi mencakup hambatan teknis dan geografis, keterbatasan sumber daya, serta kesenjangan partisipasi sosial. Meski demikian, program memberikan dampak positif berupa peningkatan aksesibilitas, mobilitas, kohesi sosial, dan produktivitas ekonomi masyarakat. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan partisipatif dan adaptif dalam mendukung keberhasilan pembangunan infrastruktur pedesaan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: efektivitas; pemberdayaan masyarakat; infrastruktur desa; partisipasi; dampak sosial

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of community empowerment programs in infrastructure development in Kotasan Village, Galang District, Deli Serdang Regency, as well as identify the challenges and social impacts they cause. A qualitative approach is used to explore the program implementation process through observation, interviews, and documentation. The results of the study show that infrastructure development programs are considered effective based on three main indicators: goal achievement, social integration, and adaptability to local conditions. The program was successfully implemented on time and on target, with the active participation of the community in all stages of development. Challenges include technical and geographical barriers, limited resources, and gaps in social participation. However, the program has a positive impact in the form of increasing accessibility, mobility, social cohesion, and community economic productivity. This research emphasizes the importance of participatory and adaptive approaches in supporting the success of sustainable rural infrastructure development.

Keywords: Effectiveness; community empowerment; village infrastructure; participation; Social impact

How to Cite: Andika, W., Ritonga, S. & Wulandari, N. (2025) Efektifitas Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang. *Journal of Law & Policy Review*. 3 (1): 101-108



PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan negara dengan populasi terbesar keempat secara global, menghadapi tantangan besar dalam pembangunan nasional, terutama terkait pemerataan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan (Gemiharto & Rosfiantika, 2017; Susanto & Pangesti, 2021). Ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan menjadi persoalan yang masih berlangsung hingga saat ini (Adisasmita, 2006; Ramadhan et al., 2024). Terlebih lagi, desa-desa di wilayah terpencil seperti di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, masih mengalami keterbatasan dalam akses terhadap infrastruktur dasar yang layak, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Ketimpangan ini bertolak belakang dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pentingnya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Keterbatasan infrastruktur di pedesaan tidak hanya berdampak pada mobilitas masyarakat, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi lokal, akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta menurunkan daya saing daerah (Aletha, 2019; Oktavia & Prayetno, 2018; Sarah Simbolon et al., 2021). Untuk itu, pembangunan desa harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara menyeluruh, termasuk melalui pembangunan infrastruktur yang tepat guna dan partisipatif. Pembangunan tersebut harus berangkat dari kebutuhan riil masyarakat dan dilaksanakan secara akuntabel dan berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia melalui kebijakan Dana Desa yang bersumber dari APBN telah berupaya menjawab tantangan tersebut dengan mendistribusikan anggaran langsung ke desa-desa, termasuk Desa Kotasan di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Dalam konteks ini, pembangunan infrastruktur di desa bukan hanya sebagai wujud fisik semata, tetapi juga merupakan bagian integral dari upaya pemberdayaan masyarakat (Muhiddin, 2017; Purnawan, 2020; Purnawan et al., 2022). Oleh karena itu, efektifitas program pembangunan infrastruktur menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan implementasi kebijakan pembangunan desa.

Penelitian terkait efektifitas pembangunan infrastruktur di desa telah banyak dilakukan. Asnuddin, dalam artikelnya *Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dengan Perlibatan Masyarakat Setempat*, menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan untuk meningkatkan keberhasilan program. Ia menemukan bahwa pelibatan aktif masyarakat sejak perencanaan hingga evaluasi dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap keberlanjutan infrastruktur. Sementara itu, Rumpia, Kiay, dan Kolondam (2019) dalam penelitian di Desa Bulude, Sulawesi Utara, menyatakan bahwa efektifitas program infrastruktur sangat ditentukan oleh tiga indikator utama: pencapaian tujuan, integrasi dengan masyarakat, dan kemampuan adaptasi terhadap kondisi lokal. Temuan ini memperkuat pendekatan evaluatif yang tidak hanya menilai hasil fisik tetapi juga aspek sosial dari pembangunan. Selain itu, studi oleh Prasetyo (2008) di wilayah Bogor menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur secara signifikan memengaruhi pertumbuhan ekonomi wilayah dan menurunkan ketimpangan sosial, terutama bila program tersebut disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan bersifat partisipatif.

Meski demikian, masih terdapat kesenjangan dalam implementasi di lapangan. Banyak desa menghadapi tantangan dalam hal perencanaan yang tidak partisipatif, alokasi anggaran yang kurang tepat sasaran, serta minimnya pemeliharaan infrastruktur pasca pembangunan. Dalam konteks ini, penelitian di Desa Kotasan menjadi penting sebagai studi kasus yang dapat memberikan gambaran konkret mengenai efektifitas program pembangunan infrastruktur berbasis pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di Desa Kotasan dengan fokus pada tiga indikator utama: pencapaian tujuan, integrasi sosial, dan kemampuan adaptasi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses implementasi program. Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap pemahaman tentang bagaimana pendekatan partisipatif dapat meningkatkan efektifitas program pembangunan desa. Secara teoretis, hasil penelitian ini memperkaya kajian tentang pembangunan berbasis komunitas dan

pemberdayaan masyarakat. Sementara secara praktis, penelitian ini memberikan masukan bagi pemerintah daerah dan pemangku kebijakan dalam merancang strategi pembangunan desa yang lebih tepat guna dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai efektivitas program pembangunan infrastruktur pedesaan di Desa Kotasan, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk menggali makna, persepsi, serta dinamika sosial yang terjadi di lapangan, khususnya dalam konteks partisipasi masyarakat dan implementasi kebijakan pembangunan desa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung kondisi infrastruktur yang dibangun serta proses pelaksanaannya. Wawancara mendalam dilakukan terhadap berbagai informan kunci, termasuk Kepala Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, dan masyarakat penerima manfaat, guna memperoleh informasi yang komprehensif mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data dengan menelaah dokumen-dokumen resmi seperti laporan kegiatan, berita acara musyawarah desa, serta dokumen perencanaan pembangunan.

Proses analisis data dilakukan secara berkelanjutan sejak pengumpulan data hingga tahap pelaporan. Teknik analisis yang digunakan mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri atas tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah data yang relevan, penyajian data dilakukan dalam bentuk naratif dan tabel ringkas, dan penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dengan mempertimbangkan keterkaitan antar-temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur

Efektivitas merupakan ukuran sejauh mana suatu tujuan dapat dicapai secara optimal dan sesuai harapan. Dalam konteks pembangunan infrastruktur pedesaan, efektivitas bukan hanya dinilai dari tercapainya target pembangunan secara fisik, tetapi juga bagaimana proses pelaksanaannya melibatkan partisipasi masyarakat serta kemampuannya beradaptasi terhadap kondisi lokal (Harahap et al., 2021; Kambey Edwien, 2014; Nasution et al., 2023). Di Desa Kotasan, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, efektivitas pelaksanaan program pembangunan infrastruktur dianalisis berdasarkan tiga indikator utama: pencapaian tujuan, integrasi sosial, dan kemampuan adaptasi terhadap konteks lokal.

1. Pencapaian Tujuan: Ketepatan Waktu dan Ketepatan Sasaran

Indikator utama dari efektivitas sebuah program pembangunan infrastruktur adalah sejauh mana program tersebut mencapai tujuannya secara tepat waktu dan tepat sasaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa dan tokoh masyarakat Desa Kotasan, pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dilakukan melalui mekanisme swakelola dinyatakan berhasil terlaksana sesuai jadwal yang telah direncanakan dalam agenda tahunan desa. Kegiatan pembangunan, seperti jalan rabat beton, pembangunan gedung PAUD, jembatan pelimpas, kantor desa, dan saluran drainase, dilakukan tepat waktu tanpa penundaan berarti.

Pencapaian ini tidak terlepas dari perencanaan yang matang melalui musyawarah desa dan dusun yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat setempat. Setiap tahapan pelaksanaan dirancang berdasarkan kebutuhan riil masyarakat yang disuarakan dalam forum musyawarah. Hal ini mencerminkan ketepatan sasaran pembangunan, karena proyek-proyek yang dikerjakan bukan hasil keputusan top-down dari pemerintah desa, tetapi merupakan hasil agregasi kebutuhan warga yang disampaikan secara terbuka.



Dalam hal ini, pendekatan partisipatif terbukti meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan. Keterlibatan warga sejak awal menjadikan mereka lebih sadar terhadap pentingnya infrastruktur yang dibangun, sehingga muncul rasa kepemilikan dan tanggung jawab untuk memastikan proyek berjalan sebagaimana mestinya. Informan dari unsur aparat desa menyebutkan bahwa masyarakat tidak hanya aktif dalam forum perencanaan, tetapi juga terjun langsung dalam pengawasan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini mempercepat proses pengambilan keputusan teknis di lapangan, terutama saat dihadapkan pada kendala yang memerlukan solusi cepat.

Selain itu, pendekatan swakelola dalam pelaksanaan pembangunan menjadi faktor penting yang mendorong tercapainya ketepatan waktu. Dengan memanfaatkan tenaga kerja lokal dan sumber daya yang tersedia di desa, pelaksanaan proyek tidak terhambat oleh proses birokrasi tender yang panjang. Kemandirian desa dalam mengelola pembangunan juga memperkuat kapasitas institusi lokal dan meningkatkan efisiensi anggaran yang berasal dari Dana Desa.

2. Integrasi Sosial: Partisipasi dan Kolaborasi Masyarakat

Efektivitas pembangunan infrastruktur juga ditentukan oleh seberapa besar integrasi sosial yang terbangun antara pemerintah desa dan masyarakat. Dalam kasus Desa Kotasan, integrasi sosial tercermin dari partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan pembangunan. Keterlibatan masyarakat bukan hanya bersifat formal dalam forum musyawarah, tetapi juga terlihat dalam bentuk kontribusi tenaga, waktu, bahkan saran teknis di lapangan.

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Desa, proses sosialisasi program pembangunan dilakukan secara berjenjang melalui rapat dusun, kemudian dilanjutkan dengan musyawarah desa yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Dalam proses ini, warga diberi kesempatan menyampaikan usulan program prioritas, mengkritisi rencana pemerintah, dan memberikan penilaian terhadap program yang sudah berjalan. Antusiasme masyarakat dalam mengikuti musyawarah mencerminkan tingkat integrasi sosial yang tinggi, yang menjadi kunci penting keberhasilan pembangunan infrastruktur.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam bentuk pengawasan sosial juga sangat membantu menjaga kualitas pembangunan. Warga dilibatkan untuk memastikan pengerjaan proyek sesuai dengan spesifikasi teknis, dan diberi ruang untuk menyampaikan keluhan atau kritik terhadap pelaksana proyek. Dalam praktiknya, keterlibatan warga ini berfungsi sebagai sistem kontrol sosial yang efisien, sehingga meminimalisasi potensi penyimpangan atau penyalahgunaan dana pembangunan.

Kepala Desa Kotasan juga menekankan pentingnya membangun kepercayaan antara pemerintah desa dan masyarakat melalui komunikasi terbuka dan transparan. Keberhasilan program pembangunan tidak hanya dilihat dari hasil akhir yang tampak, tetapi juga dari bagaimana prosesnya menciptakan ruang kolaboratif yang sehat antara warga dan pemerintah. Dalam hal ini, program pembangunan infrastruktur juga berfungsi sebagai media penguatan kohesi sosial di tingkat lokal.

3. Kemampuan Adaptasi: Menyesuaikan Program dengan Kondisi Lokal

Indikator ketiga dari efektivitas program pembangunan adalah kemampuannya beradaptasi terhadap kondisi lokal, baik dari segi geografis, budaya, maupun sumber daya yang tersedia. Desa Kotasan memiliki tantangan tersendiri, terutama dalam hal aksesibilitas. Lokasi toko bangunan yang jauh dan kondisi jalan yang rusak saat musim hujan menjadi hambatan utama dalam proses pengangkutan alat dan bahan bangunan.

Namun demikian, pelaksanaan program di Desa Kotasan menunjukkan respons adaptif yang cukup baik. Pembangunan dijadwalkan saat musim kemarau untuk menghindari kendala logistik. Pemerintah desa juga memprioritaskan pembangunan jalan terlebih dahulu sebagai infrastruktur dasar yang menjadi kunci keberlanjutan pembangunan sektor lainnya. Strategi ini memungkinkan program-program pembangunan selanjutnya berjalan lebih lancar karena aksesibilitas ke desa telah membaik.

Dari sisi budaya lokal, pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan norma dan nilai sosial yang berlaku. Musyawarah dilakukan dalam suasana kekeluargaan dan menjunjung tinggi nilai mufakat,

sehingga setiap keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan aspirasi kolektif warga. Budaya gotong royong yang masih kuat di Desa Kotasan menjadi fondasi sosial yang memperkuat keberhasilan pembangunan.

Program juga menunjukkan fleksibilitas dalam pelaksanaannya, seperti penyesuaian jadwal kegiatan dengan kondisi cuaca dan ketersediaan tenaga kerja lokal. Dalam beberapa kasus, kegiatan pembangunan dilaksanakan dengan sistem bergilir agar tidak mengganggu aktivitas harian warga. Pendekatan ini mencerminkan kemampuan adaptif desa dalam mengelola sumber daya manusia secara optimal tanpa mengorbankan kepentingan produktif masyarakat.

Adaptasi juga terlihat dari kemampuan desa dalam mengelola anggaran secara efisien. Meskipun anggaran bersumber dari Dana Desa, penggunaan dana dilakukan berdasarkan skala prioritas dan urgensi kebutuhan warga. Setiap pengeluaran dipertimbangkan secara matang dalam forum musyawarah, dan dilaporkan secara terbuka untuk menjaga akuntabilitas.

4. Refleksi terhadap Model Efektivitas: Antara Konstruksi Fisik dan Pemberdayaan Sosial

Pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di Desa Kotasan secara umum menunjukkan efektivitas yang tinggi dari ketiga indikator utama. Namun, efektivitas ini tidak hanya perlu dilihat dari hasil pembangunan fisik semata, melainkan juga dari aspek pemberdayaan masyarakat sebagai proses sosial. Keberhasilan pembangunan infrastruktur yang partisipatif seperti di Kotasan telah menciptakan masyarakat yang lebih mandiri, berdaya, dan sadar akan pentingnya keterlibatan dalam pembangunan desa.

Pengalaman ini juga mencerminkan bahwa pembangunan desa yang efektif membutuhkan sinergi antara kebijakan makro dari pemerintah pusat (dalam bentuk Dana Desa) dan kapasitas lokal desa dalam menyerap dan mengelola kebijakan tersebut. Dalam konteks ini, Desa Kotasan telah menunjukkan kapasitas kelembagaan dan sosial yang memadai untuk menjalankan program secara berkelanjutan.

Namun demikian, efektivitas yang dicapai tetap memerlukan evaluasi berkala agar dapat mempertahankan kualitas dan merespons dinamika kebutuhan masyarakat. Perawatan infrastruktur pasca pembangunan, pemutakhiran data kebutuhan masyarakat, dan pelibatan generasi muda dalam musyawarah desa merupakan aspek-aspek lanjutan yang perlu diperhatikan agar capaian efektivitas tetap relevan dan berkelanjutan.

Tantangan dan Dampak Sosial Program Pembangunan Infrastruktur

Meskipun program pembangunan infrastruktur di Desa Kotasan menunjukkan capaian yang cukup baik dari segi efektivitas, dalam pelaksanaannya tetap tidak terlepas dari berbagai tantangan yang muncul, baik dari aspek teknis, geografis, maupun sosial. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur ini juga memberikan berbagai dampak sosial yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam sub bab ini, akan dibahas secara komprehensif mengenai dua hal tersebut: tantangan pelaksanaan dan dampak sosial program.

1. Tantangan Teknis dan Geografis dalam Pelaksanaan Program

Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di Desa Kotasan adalah kondisi geografis dan infrastruktur dasar yang masih terbatas. Letak toko bangunan yang jauh dari desa menjadi hambatan logistik dalam pengangkutan bahan bangunan. Ditambah lagi, kondisi jalan penghubung yang belum memadai, terutama saat musim hujan, menyebabkan kendaraan pengangkut bahan sering mengalami kesulitan mencapai lokasi pembangunan. Hal ini tidak hanya menghambat waktu pelaksanaan, tetapi juga menambah biaya dan memperbesar risiko kerusakan material saat pengangkutan.

Selain itu, keterbatasan alat berat dan perlengkapan teknis yang tersedia di desa membuat beberapa proses pembangunan harus dilakukan secara manual. Meskipun hal ini membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal, namun secara teknis hal tersebut juga menuntut waktu dan tenaga lebih banyak untuk menyelesaikan proyek. Proses ini juga menuntut koordinasi yang ketat agar tidak terjadi keterlambatan atau ketidaksesuaian dalam spesifikasi teknis pembangunan.

Tantangan lainnya berkaitan dengan aspek ketersediaan dan kualitas tenaga kerja lokal. Meski pelaksanaan proyek dilakukan dengan pendekatan swakelola, kapasitas teknis warga dalam bidang konstruksi masih bervariasi. Beberapa pekerjaan teknis yang membutuhkan keahlian khusus terkadang harus mendatangkan tenaga ahli dari luar desa. Ini menciptakan tantangan baru dalam hal koordinasi, komunikasi, serta efisiensi biaya.

Dari sisi manajemen, pelaksanaan proyek juga menghadapi tantangan dalam perencanaan dan penganggaran. Meskipun musyawarah desa telah dilakukan dengan cukup matang, perubahan harga bahan bangunan atau ketidaksesuaian perhitungan anggaran awal dapat menyebabkan realokasi anggaran di tengah pelaksanaan proyek. Proses revisi ini, walaupun wajar terjadi, memerlukan mekanisme yang cepat dan responsif agar tidak mengganggu kelangsungan proyek.

2. Tantangan Sosial dan Budaya

Selain tantangan teknis, pelaksanaan pembangunan infrastruktur juga menghadapi dinamika sosial dan budaya di tengah masyarakat. Salah satu persoalan yang muncul adalah kesenjangan partisipasi antar kelompok masyarakat. Meski secara umum tingkat partisipasi masyarakat cukup tinggi, terdapat beberapa kelompok yang cenderung pasif atau tidak terlibat secara maksimal, baik karena alasan pekerjaan, ketidakpedulian, atau minimnya informasi. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada pekerjaan rumah dalam hal pemerataan informasi dan penguatan kesadaran warga terhadap pentingnya pembangunan partisipatif.

Kondisi sosial lainnya yang menjadi tantangan adalah perbedaan persepsi atau ekspektasi antar warga mengenai prioritas pembangunan. Dalam beberapa musyawarah, muncul perdebatan antara kelompok warga yang ingin pembangunan difokuskan pada infrastruktur pertanian, dengan kelompok lain yang menginginkan peningkatan fasilitas pendidikan atau kesehatan. Dinamika ini menuntut kemampuan mediasi dari pemerintah desa untuk mengakomodasi berbagai kepentingan secara adil dan transparan.

Selain itu, muncul pula tantangan terkait pola pemeliharaan infrastruktur pasca pembangunan. Banyak warga yang menganggap bahwa tanggung jawab terhadap infrastruktur hanya terletak pada pemerintah desa, bukan pada masyarakat pengguna. Hal ini berpotensi menurunkan keberlanjutan program, karena tanpa kesadaran kolektif untuk merawat fasilitas yang telah dibangun, infrastruktur berisiko rusak lebih cepat.

3. Dampak Sosial Positif Pembangunan Infrastruktur

Di balik berbagai tantangan yang ada, pembangunan infrastruktur di Desa Kotasan telah memberikan dampak sosial yang signifikan dan positif bagi kehidupan masyarakat. Salah satu dampak paling nyata adalah peningkatan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat. Jalan rabat beton yang telah dibangun mempermudah warga dalam melakukan aktivitas sehari-hari, mulai dari pergi ke sekolah, mengakses layanan kesehatan, hingga memasarkan hasil pertanian. Dengan akses jalan yang lebih baik, konektivitas antar dusun di desa semakin lancar dan aktivitas ekonomi menjadi lebih efisien.

Selain aspek fisik, pembangunan infrastruktur juga memberikan kontribusi terhadap penguatan kapasitas sosial dan kemandirian masyarakat. Dengan pendekatan swakelola dan partisipatif, warga memperoleh pengalaman langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan. Hal ini membangun semangat gotong royong, solidaritas, serta meningkatkan literasi warga terhadap proses pengelolaan anggaran desa dan tata kelola pembangunan.

Program pembangunan juga mendorong terciptanya ruang-ruang publik seperti Posyandu dan PAUD yang menjadi pusat aktivitas sosial dan pendidikan masyarakat. Fasilitas ini bukan hanya tempat pelayanan, tetapi juga berfungsi sebagai ruang interaksi sosial yang memperkuat relasi antar warga dan menciptakan kohesi sosial yang lebih kuat.

Dari sisi ekonomi, infrastruktur yang memadai telah membuka peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan akses terhadap pasar. Hasil pertanian lebih mudah dijangkau oleh pedagang luar desa, dan biaya transportasi pun menurun secara signifikan. Hal ini berkontribusi pada peningkatan pendapatan keluarga dan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara perlahan namun berkelanjutan.

4. Refleksi Dampak Jangka Panjang

Melihat capaian pembangunan infrastruktur di Desa Kotasan, dapat disimpulkan bahwa manfaatnya tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga memberikan efek jangka panjang terhadap pembangunan desa yang berkelanjutan. Peningkatan akses, pertumbuhan ekonomi lokal, dan penguatan kapasitas sosial merupakan fondasi penting bagi tahap pembangunan selanjutnya.

Namun, untuk menjaga keberlanjutan dampak tersebut, dibutuhkan komitmen bersama dalam merawat infrastruktur yang telah dibangun dan memperkuat budaya partisipatif dalam pembangunan desa. Pemerintah desa perlu menyusun strategi pemeliharaan berbasis komunitas dan mendorong pembentukan kelompok kerja atau relawan yang bertanggung jawab terhadap perawatan fasilitas umum.

Selain itu, penting juga dilakukan evaluasi berkala terhadap program pembangunan yang telah dilaksanakan. Evaluasi ini harus melibatkan masyarakat secara aktif, tidak hanya sebagai responden tetapi juga sebagai pengambil keputusan dalam menentukan arah pembangunan selanjutnya. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur tidak hanya menjadi simbol keberhasilan pemerintah desa, tetapi juga menjadi milik dan tanggung jawab bersama masyarakat Desa Kotasan.

SIMPULAN

Pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di Desa Kotasan menunjukkan efektivitas tinggi berdasarkan tiga indikator utama: pencapaian tujuan, integrasi sosial, dan kemampuan adaptasi. Program berhasil dilaksanakan tepat waktu dan tepat sasaran melalui pendekatan swakelola dan musyawarah partisipatif yang mengedepankan kebutuhan riil masyarakat. Partisipasi aktif warga menciptakan integrasi sosial yang kuat dan pengawasan yang efektif, sementara kemampuan desa untuk menyesuaikan pelaksanaan program dengan kondisi geografis dan budaya lokal menunjukkan adaptasi yang baik, sehingga pembangunan berjalan efisien dan berkelanjutan.

Meskipun efektif, program pembangunan dihadapkan pada berbagai tantangan teknis dan sosial seperti keterbatasan akses logistik, peralatan, serta kapasitas tenaga kerja lokal, dan belum meratanya partisipasi warga. Namun demikian, dampak sosial yang dihasilkan sangat positif, mencakup peningkatan aksesibilitas, pertumbuhan ekonomi lokal, penguatan kapasitas sosial, serta terciptanya ruang publik dan semangat gotong royong. Untuk menjaga keberlanjutan dampak ini, diperlukan kesadaran kolektif dalam pemeliharaan infrastruktur dan evaluasi partisipatif sebagai bentuk komitmen bersama terhadap pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2006). *Pembangunan pedesaan dan perkotaan*. Graha ilmu.
- Aletha, B. (2019). *PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA BULANGKULON KECAMATAN BENJENG KABUPATEN GRESIK (Studi Kasus Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Bulangkulon)*. Universitas Wijaya Putra.
- Gemiharto, I., & Rosfiantika, E. (2017). Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Di Indonesia (Studi Kasus Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengelolaan). *JIPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM*, 7.
- Harahap, D. R., Badaruddin, B., & Harahap, R. H. (2021). Efektivitas Penerapan Sistem E-Planning Dalam Perencanaan Pembangunan di Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan. *Perspektif*, 10(1), 76–87. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4073>
- Kambey Edwien. (2014). *Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Karegesan Kecamatan Kautidan Kabupaten Minahasa Utara*.

- Muhiddin, A. (2017). *Evaluasi kebijakan publik (studi kesiapan desa menerima dana desa di kabupaten gowa)*.
- Nasution, B. S., Hartono, B., & Isnaini, I. (2023). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Kampung Medang Ara Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 3112–3118. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1769>
- Oktavia, M., & Prayetno, P. (2018). Menguji Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Rianiate Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 1(2), 81–92. <https://doi.org/10.34007/jehss.v1i2.12>
- Prasetyo, R. B. (2008). *Ketimpangan dan Pengaruh Infrastruktur terhadap Pembangunan Ekonomi Kawasan Barat Indonesia (KBI)*. <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/18122>
- Purnawan, H. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA MAKARTITAMA DAN DI DESA ULAK MAS KECAMATAN LAHAT KABUPATEN LAHAT. *Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*, 9(1), 35–55.
- Purnawan, H., Triyanto, D., & Thareq, S. I. (2022). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Taba Air Pauh Kabupaten Kepahiang. *Perspektif*, 11(2). <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.5876>
- Ramadhan, A. F., Hafiz, A., Nabila, A. N., Ronggur, A., & Dewinta, C. (2024). Analisis Dinamika Keadilan Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Kasus Pencapaian Hak Tanah Masyarakat Desa Wadas terhadap Rencana Pembangunan Bendungan Bener. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 3(2), 331–351.
- Sarah Simbolon, D., Sari, J., Yolanda Purba, Y., Indah Siregar, N., Salsabila, R., & Manulang, Y. (2021). Peranan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2). <https://pdfs.semanticscholar.org/1488/bf097c4c84f03c05fa9d7eab4f9b8190f0fb.pdf>
- Studi, P., Bulude, D., Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud, K., & Utara GIFFRIED RUMPIA BURHANUDIN KIAY HELLY F KOLON DAM, S. R. (2019). EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (Studi: Desa Bulude, Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara). *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, 5(74). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/23772>
- Susanto, R., & Pangesti, I. (2021). Pengaruh Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 7(2), 271. <https://doi.org/10.30998/jabe.v7i2.7653>